

**PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PENGGUNA, DUKUNGAN  
MANAJEMEN PUNCAK, DAN KUALITAS DATA TERHADAP  
IMPLEMENTASI SIMDA**

(Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Pariaman)

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**FIRDA DHUHA ARBAIN**

**1207131/2012**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

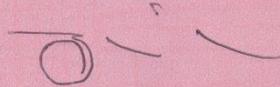
PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PENGGUNA, DUKUNGAN  
MANAJEMEN PUNCAK, DAN KUALITAS DATA TERHADAP  
IMPLEMENTASI SIMDA  
(Studi Empiris pada SKPD Pemerintahan Kota Pariaman)

Nama : Firda Dhuha Arbain  
Nim/BP : 1207131/2012  
Jurusan : Akuntansi  
Keahlian : Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, 30 Januari 2018

Disetujui Oleh

PEMBIMBING I



Dr.H.Efrizal Syofyan, SE, M.Si, CA, Ak  
NIP. 19580519 199001 1 001

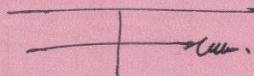
PEMBIMBING II



Vita Fitria Sari, SE, M.Si  
NIP. 19870515 201012 2 009

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak  
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Penguji Ujian Skripsi*

*Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi*

*Universitas Negeri Padang*

**Judul** : Pengaruh Tingkat Pemahaman Pengguna, Dukungan Manajemen Puncak, dan Kualitas Data terhadap Implementasi SIMDA (Studi Empiris pada SKPD Pemerintahan Kota Pariaman)

**Nama** : Firda Dhuha Arba'in

**NIM/BP** : 1207131/2012

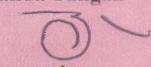
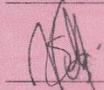
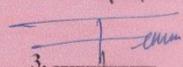
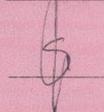
**Jurusan** : Akuntansi

**Keahlian** : Sektor Publik

**Fakultas** : Ekonomi

Padang, 30 Januari 2018

Tim penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, CA, Ak	1. 
Sekretaris	Vita Fitria Sari, SE, M.Si	2. 
Anggota	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	3. 
Anggota	Salma Taqwa, SE, M.Si	4. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firda Dhuha Arba'in  
NIM/Tahun Masuk : 1207131/2012  
Tempat/Tanggal Lahir : Marunggi/19 Mei 1993  
Jurusan : Akuntansi S1  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Ps. Ganting Marunggi, Pariaman Selatan  
No. HP/Telepon : 082384192227  
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pemahaman Pengguna, Dukungan Manajemen Puncak, Dan Kualitas Data Terhadap Implementasi SIMDA (Studi Empiris pada SKPD Pemerintahan Kota Pariaman)

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani **Asli** oleh tim pembimbing, tim penguji, dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, 30 Januari 2018

Penulis



**Firda Dhuha Arba'in**  
NIM. 1207131/2012

## ABSTRAK

### **Pengaruh Tingkat Pemahaman Pengguna, Dukungan Manajemen Puncak, dan Kualitas Data terhadap Implementasi SIMDA**

*(Studi Empiris pada SKPD Pemerintahan Kota Pariaman)*

**Firda Dhuha Arbain**

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang  
E-mail : [firdadhuhu@gmail.com](mailto:firdadhuhu@gmail.com)

**Pembimbing: 1. Dr. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, CA, Ak,  
2. Vita Fitria Sari, SE, M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh tingkat pemahaman pengguna, dukungan manajemen puncak dan kualitas data terhadap implementasi SIMDA (studi empiris pada SKPD pemerintahan Kota Pariaman). Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD yang ada pada Pemerintahan Kota Pariaman tahun 2017, sedangkan sampel penelitian ditentukan dengan metode *total sampling* sehingga diperoleh 29 SKPD sebagai sampel. Jenis data yang digunakan berupa data primer. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pengguna memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi SIMDA, begitu juga dengan dukungan manajemen puncak memiliki signifikan terhadap implementasi SIMDA. Dan kualitas data tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi SIMDA.

**Kata Kunci : Pemahaman pengguna, dukungan manajemen puncak, kualitas data, implementasi SIMDA**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia serta hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan pada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Pemahaman Pengguna, Dukungan Manajemen Puncak, dan Kualitas Data Terhadap Implementasi SIMDA Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Pariaman”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program S-1 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan dorongan. Sehingga pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran, waktu dan tenaga serta bantuan moril maupun materil khususnya kepada:

1. Bapak Dr.H.Efrizal Syofyan, SE, M.Si, CA, Akselaku Pembimbing I dan Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku penguji I, dan Ibu Salma Taqwa, SE, M.Si, selaku penguji II yang telah memberikan masukan, saran serta kritikan untuk bisa membuat skripsi ini lebih baik.

3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Bapak Dr. Idris, M.Si serta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku Ketua Jurusan dan Bapak Henri Agustin, SE,M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha yang memberikan kelancaran serta Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang memberikan penulis kemudahan dalam mendapatkan bahan bacaan.
7. Teristimewa kepada orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungan baik materil maupun moril kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat tercinta, Retno Istiani, Innes Dahlia, Fitria Erita, dan sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, serta rekan-rekan seperjuangan jurusan Akuntansi angkatan 2012, yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan, petunjuk, arahan dan kerja sama yang diberikan tidak sia-sia di kemudian hari dan semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sebuah

kesempurnaan baik segi materi maupun teknik penulisan. Masih banyak hal-hal yang harus dibenahi dan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini

Padang, Februari 2018

Firda Dhuha Arba'in

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Perumusan Masalah</b> .....	7
<b>C. Tujuan</b> .....	8
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	8
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS .....	9
<b>A. Kajian Teori</b> .....	9
<b>1. Konsep Implementasi Kebijakan</b> .....	9
<b>2. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)</b> .....	13
<b>3. Tingkat Pemahaman Pengguna</b> .....	21
<b>4. Dukungan Manajemen Puncak</b> .....	24
<b>5. Kualitas Data</b> .....	26
<b>B. Penelitian Terdahulu</b> .....	28
<b>C. Hubungan Antar Variabel</b> .....	31
<b>1. Pengaruh tingkat pemahaman pengguna terhadap implementasi SIMDA</b> ...	31
<b>2. Pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap implementasi SIMDA</b> ...	32
<b>3. Pengaruh kualitas data terhadap implementasi SIMDA</b> .....	33
BAB III METODE PENELITIAN .....	35
<b>A. Jenis Penelitian</b> .....	35
<b>B. Populasi Dan Sampel</b> .....	35
<b>C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data</b> .....	37
<b>D. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel</b> .....	38
<b>E. Instrumen Penelitian</b> .....	39
<b>F. Metode Analisis Data</b> .....	40
<b>1. Uji Validitas dan Reliabilitas</b> .....	40
<b>2. Uji Asumsi Klasik</b> .....	42

3. Uji hipotesis .....	43
G. Definisi Operasional.....	47
BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	48
A. Gambaran Umum Dan Objek Penelitian .....	48
B. Demografi Respoden.....	49
1. Karakteristik responden.....	49
2. Statistik Deskriptif .....	53
3. Deskripsi Variabel Penelitian .....	55
C. Uji Validitas dan Realibilitas Penelitian .....	59
1. Uji Validitas.....	59
2. Uji Reliabilitas .....	60
D. Uji Asumsi Klasik .....	61
1. Uji Normalitas .....	61
2. Uji multikolinearitas .....	62
3. Uji Heterokedastisitas.....	63
E. Uji Model .....	64
1. Uji F.....	64
2. Uji Koefisien Determinasi .....	65
3. Koefisien Regresi Berganda .....	66
F. Uji Hipotesis ( <i>t test</i> ) .....	67
G. Pembahasan.....	69
1. Pengaruh Tingkat Pemahaman Pengguna Terhadap Implementasi SIMDA .....	69
2. Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Implementasi SIMDA .....	71
3. Pengaruh Kualitas Data Terhadap Implementasi SIMDA .....	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Keterbatasan penelitian.....	75
C. Saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	77
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel 3.1	Jumlah Karyawan SKPD Kota Pariaman.....	36
Tabel 3.2	Skala Pengukuran.....	39
Tabel 3.3	Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	40
Tabel 4.1	Tingkat Pengembalian Kuesioner oleh SKPD .....	48
Tabel 4.2	Karakteristik responden berdasarkan usia.....	49
Tabel 4.3	Jumlah responden SKPD Berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
Tabel 4.4	Karakteristik Respdnen SKPD berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	51
Tabel 4.5	Karakteristik Responden SKPD Berdasarkan Masa Kerja .....	52
Tabel 4.6	Jumlah Responden SKPD Berdasarkan Jabatan .....	52
Tabel 4.7	Statistik deskriptif .....	53
Tabel 4.8	Distribusi Frekuensi Skor Variabel Implementasi SIMDA .....	56
Tabel 4.9	Distribusi Frekuensi Skor Variabel Tingkat Pemahaman Pengguna ....	57
Tabel 4.10	Distribusi Frekuensi Skor Variabel Dukungan Manajemen Puncak ..	58
Tabel 4.11	Distribusi Frekuensi Skor Variabel Kualitas Data.....	58
Tabel 4.12	Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Terkecil .....	59
Tabel 4.13	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Instrumen Penelitian .....	60
Tabel 4.14	Uji Normalitas.....	61
Tabel 4.15	Uji Multikolinearitas .....	62
Tabel 4.16	Uji Heterokedastisitas .....	63
Tabel 4.17	Uji F Hitung .....	64
Tabel 4.18	<i>Adjusted R Square</i> .....	65
Tabel 4.19	Koefisien Regresi Berganda .....	66

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Kerangka Konseptual .....	34
------------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Sura Permohonan Penelitian

Lampiran 2 Kuisisioner Penelitian

Lampiran 3 Tabulasi Hasil Kuisisioner

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari keterpaduan dan sinergisitas seluruh elemen perangkat daerah yang ada didalamnya. Dukungan dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh pihak Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah pun menjadi faktor penting keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Salah satu langkah pendukung yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah memberikan kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Revan, *et.al.*, 2012). Kewenangan yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Pemerintah Daerah dan Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas penggunaan anggaran yang telah diberikan.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwasannya karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat diandalkan (*reliable*), yaitu sistem yang mampu mengelola data-data (*input*) dan menghasilkan informasi (*output*) yang dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan

dalam mengambil keputusan, serta dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya lebih komprehensif, meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah(Revan,*et, al.* 2012).

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP Nomor 11 tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Sejalan dengan itu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan fungsinya sebagai internal auditor dan sebagai pengemban amanat pembina penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008 telah mengembangkan sistem aplikasi komputer yang dapat mengolah data transaksi keuangan menjadi laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan setiap saat, yakni Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan praktik pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

SIMDA merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan(BPKP, 2008).Tujuan dalam penerapan SIMDA diantaranya; menyediakan data base mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian, aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat

digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik. Selanjutnya memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Penggunaan SIMDA oleh pemerintah daerah merupakan kebijakan yang harus dijalankan. Dalam teori kebijakan implementasi publik yang mengatakan bahwa “suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksana memenuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan”. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam PP No. 56 tahun 2005 “untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik”.

Implementasi SIMDA akan memberikan dampak yang positif pada Pemerintahan Daerah, karena aplikasi SIMDA ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan dilingkungan SKPD. Oleh sebab itu pengendalian terhadap aplikasi SIMDA menjadi suatu keharusan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah (Fuad dan Fefri, 2013).

Beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang terkait dengan implementasi SIMDA diantaranya adalah Alfian (2014) yang meneliti variabel tingkat pemahaman pengguna, kualitas data *input* dan dukungan manajemen puncak serta kualitas laporan keuangan. Penelitian Ayu (2013) menggunakan variabel dukungan manajemen puncak, kualitas sistem, kualitas informasi, pengguna aktual dan kepuasan pengguna terhadap implementasi SIMDA. Selanjutnya penelitian Bahri, *et al* (2015) menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi SIMDA dan kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Yogyakarta.

Tingkat pemahaman pengguna merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Implementasi SIMDA pada pemerintah daerah. Kesuksesan penggunaan *software* tergantung pada teknologi itu sendiri dan tingkat keahlian individu yang mengoperasikannya (Devi, 2013). Menurut Seddon (1997) dengan mengatasi kelemahan aplikasi agar menjadi lebih baik, kepuasan pengguna akhir (*and users*) dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi *software* akuntansi yang digunakan pada sebuah organisasi. Selain itu pemahaman pemakai tentang teknologi informasi menentukan keberhasilan suatu sistem informasi, sebaliknya ketidaktahuan atau kecemasan pemakai terhadap sistem yang baru dapat menyebabkan kegagalan dalam menggunakan teknologi informasi (Mohammad Alfian, 2014). Dapat kita simpulkan bahwa tingkat pemahaman pengguna dapat menentukan keberhasilan implementasi SIMDA pada suatu daerah.

Faktor lain yang mempengaruhi Implementasi SIMDA adalah dukungan manajemen puncak. Dukungan manajemen adalah keterlibatan manajemen dalam mempertahankan perilaku dan pencapaian tujuan organisasi (Cooper, 2006). Thong, *et.al.* (1996) menyatakan bahwa jika tingkat dukungan manajemen puncak rendah maka manajemen puncak tidak mungkin terlibat dalam aspek pelaksanaan SIA seperti (tanggapan terhadap rekomendasi konsultan, atau memantau proyek pengembangan SIA tersebut), mereka menemukan bahwa komitmen manajemen meningkatkan efektifitas sistem informasi karena mereka menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan untuk proyek-proyek pengembangan SIA. Peningkatan komitmen manajemen terhadap perkembangan SIMDA akan berdampak langsung terhadap implementasi SIMDA tersebut.

Selanjutnya, faktor yang diprediksi mempengaruhi Implementasi SIMDA adalah kualitas data. Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan, data dapat berupa angka-angka, huruf-huruf atau simbol-simbol khusus atau gabungan darinya. Data tidak dapat bercerita banyak sebelum data tersebut diolah lebih lanjut ke proses *input* dimana tahap ini merupakan proses memasukkan data kedalam komputer lewat alat input (*input device*). Maksud dari kualitas data adalah seluruh proses dalam menghasilkan data yang akan digunakan harus berjalan dengan baik, agar data tersebut dapat digunakan dan dapat diproses lebih lanjut. Proses produksi data harus berjalan dengan baik agar mencapai hasil yang berkualitas (Lee dan Kuat dalam Al-

Hiyari, *et. al*, 2013). Xu (2009) menyatakan bahwa kualitas *output*SIA bergantung dari input data yang ada.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama 30 (tiga puluh) hari kerja melakukan praktik lapangan pada DPPKA Kota Pariaman, penulis menemukan permasalahan dalam implementasi SIMDA ini diantaranya: Kemampuan penguasaan pengoperasian SIMDA yang belum merata di setiap SKPD, *software* ini menuntut penggunaanya tidak hanya fasih dalam akuntansi tetapi juga dalam penggunaan komputer, kurang mampunya pengoperasian SIMDA ini dinilai penulis selama melakukan praktik lapangan setidaknya dalam sehari ada 3 (tiga) orang staf dari SKPD datang ke DPPKA kota Pariaman untuk bertanya dan meminta bantuan dalam pengoperasian SIMDA.

Selanjutnya masih banyak ditemukan pegawai yang lebih memilih menggunakan kertas kerja manual atau dengan *Ms. Excell* untuk menyelesaikan pekerjaannya yang dirasa lebih mudah daripada menggunakan SIMDA, hal inipun dialami sendiri oleh penulis yang diberitugas oleh staf DPPKA Kota Pariaman dalam mencatat persedian aset Kota Pariamandengan menggunakan *Ms. Excell*.

Dari hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Alfian (2014), Al -Hiyari, *et.al*. (2013), Bahri Kamal, *et.al*. (2015), Sang Ayu, *et.al*.(2013), Dunuk Setiawati (2015), penulis ingin melakukan penelitian kembali karena masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian atas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SIMDA, selain itu berdasarkan pengamatan dan pengalaman yang dirasakan penulis secara langsung selama praktik lapangan

pada DPPKA Kota Pariaman penulis merasa perlu menguji ulang variabel ini kembali dengan sampel dan periode yang berbeda, agar dapat digunakan dalam pengimplementasian SIMDA. Peneliti menggunakan periode yang terbaru yaitu tahun 2016 dengan sampel dan responden pada SKPD di Kota Pariaman yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Objek penelitian yang digunakan difokuskan pada SKPD dengan alasan SKPD merupakan lembaga pemerintahan yang menggunakan aplikasi SIMDA.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul, **“PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PENGGUNA, DUKUNGAN MANAJEMEN PUNCAK DAN KUALITAS DATA TERHADAP IMPLEMENTASI SIMDA (Studi Empiris Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pariaman)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka disusunlah perumusan masalah sebagai berikut :

1. Sejauh mana pengaruh tingkat pemahaman pengguna terhadap terhadap implementasi SIMDA pada pemerintah daerah Kota Pariaman?
2. Sejauh mana pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap terhadap implementasi SIMDA pada pemerintah daerah Kota Pariaman?
3. Sejauh mana besar pengaruh kualitas data terhadap implementasi SIMDA pada pemerintah daerah Kota Pariaman?

### **C. Tujuan**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh :

1. Tingkat pemahaman pengguna terhadap terhadap implementasi SIMDA pada Pemerintah Daerah Kota Pariaman
2. Dukungan manajemen puncak terhadap terhadap implementasi SIMDA pada Pemerintah Daerah Kota Pariaman?
3. Kualitas data terhadap implementasi SIMDA pada Pemerintah Daerah Kota Pariaman?

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Dilihat dari sudut peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pembuktian tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi SIMDA.

2. Dilihat bagi objek penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat meberikan masukan dalam pengimplementasi SIMDA di Pemerintah Kota Pariaman.

3. Untuk perguruan tinggi

Penelitian tentang implementasi SIMDA ini diharapkan dapat menjadi referensi bacaan mahasiwa dan menambah koleksi bacaan pada perpustakaan Fakultas Ekonomi dan perpustakaan pusat di Universitas Negeri Padang.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Konsep Implementasi Kebijakan**

###### **a. Pengertian Kebijakan Publik**

Pengertian kebijakan publik dilihat dari segi istilah “*policy*” (kebijakansanaan) sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, ulasan-ulasan rancangan besar (Abdul Wahab, 2012:12).

Kebijakan publik menurut Wilson (dalam Abdul Wahab, 2012:13) adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu langkah-langkah yang tengah/ sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi). Sedangkan menurut Dye (dalam Abdul Wahab, 2012:14) kebijakan publik adalah pilihan apapun oleh pemerintah baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah.

Selanjutnya kebijakan publik menurut Lemieux adalah pruduk aktivitas untuk memecahkan masalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang terstruktur, proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa kebijakan publik itu adalah tindakan yang mengarah pada tujuan yang

diusulkan oleh suatu kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

#### **b. Implementasi Kebijakan Publik**

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang sangat penting bahkan mungkin lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan.

Van Meter dan Van Horn merumuskan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Kebijakan yang telah dirumuskan bisa mengalami kegagalan pada tahap implementasi, kegagalan ini terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (pergantian kekuasaan, bencana alam dan sebagainya). Kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dihendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal disebabkan oleh faktor pelaksanaannya yang jelek (*bad execution*, kebijakan sendiri memang jelek (*bad policy*), atau kebijakannya berhasil jelek (*bad luck*).

Pelaksanaan kebijakan publik dalam masyarakat akan menimbulkan dampak positif yang diharapkan oleh pembuat kebijakan, dalam pelaksanaannya membawa manfaat bagi pemerintah, namun ada juga dampak

yang tidak diharapkan atau dampak negatif. Dampak positif dan negatif ini sangat dipengaruhi lingkungan dan akan menjadi umpan balik yang akan dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan publik sebagai masukan baru.

### **c. Teori Atau Model Implementasi Kebijakan Publik**

Model Van Meter dan Van Horn 1975 (abdul wahab, 2014:164) mengatakan "*A model of the implementation process*" (model proses implementasi kebijakan), dalam teorinya beranjak dari argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan.

Van Meter dan Van Horn membuat tipologi kebijakan menurut a) jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan, b) jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Implementasi kebijakan kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dihendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari mereka yang mengoperasikan program relatif tinggi.

Model Mazmanian dan Sabtier menunjukkan implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel yaitu: a) karakteristik masalah, b) struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai peraturan yang mengoperasikan kebijakan, c) proses implementasi.

Pemikiran mereka menganggap suatu implementasi kebijakan akan efektif apabila birokrasi pelaksana memenuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksana, petunjuk teknis), sehingga model ini sering

disebut sebagai *model top-down*, dengan demikian maka tujuan dan sasaran dari program harus jelas dan konsisten, karena itu merupakan standar evaluasi dan sasaran yang legal bagi birokrasi, karena kebijakan adalah independen terhadap perubahan kondisi fisik dan sosial yang dikehendaki.

Pandangan Hogwood dan Gunn (Abdul Wahab, 2014:167) masih tergolong model implemetasi *top-down*, menurut kedua pakar ini untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna (*perfect implemetation*) diperlukan beberapa persyaratan tersebut. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksanan tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius.
- b. Untuk pelaksana program, tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kuasalitas yang handal.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntun dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Para ahli mengembangkan berbagai model untuk menganalisa kebijakan publik, masing-masing model mempunyai karakteristik sendiri-sendiri dan pengajunya selalu mengatakan bahwa modelnya yang paling baik(efektif) untuk menganalisa kebijakan publik. Namun, tidak ada yang dianggap paling baik karena masing-masing model memusatkan perhatiannya pada aspek kehidupan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan model dari Hogwood dan Gunn (Abdul Wahab 2014:167), hal ini disebabkan karena kriteria yang diajukan lebih tepat terutama berkaitan dengan implementasi SIMDA.

## **2. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)**

### **a. Pengertian SIMDA**

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang dapat didistribusikan di setiap SKPD dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah. SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap,

akurat, dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan.

**b. Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)**

Tujuan diterapkannya aplikasi SIMDA (BPKP, 2008) adalah:

- a. Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja sama penerima koneksitas jaringan SIMDA;
- b. Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan *webcam* bagi unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA;
- c. Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya;
- d. Sebagai media awal bagi pelaksanaan *e-governemen*; dan
- e. Sebagai sarana untuk pelaksanaan *good government*.

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi SIMDA keuangan daerah terintegrasi (BPKP, 2008) adalah sebagai berikut :

- a. Database terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yang sama;
- b. Data yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data terjamin); dan
- c. Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana:

- 1) Output dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan
- 2) Output dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/ kebijakan.

**c. Klasifikasi SIMDA**

SIMDA dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan (BPKP, 2008), yaitu :

- a. Sistem informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan;
- b. Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan dinas/badan/lembaga sebagai pendukung informasi strategis pimpinan daerah; dan
- c. Sistem informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok masing-masing dinas/ lembaga.

**d. Unsur SIMDA**

Kerangka arsitektur SIMDA terdiri dari empat lapis struktur (BPKP,2008), yaitu.

- a. Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik;
- b. Portal, pelayanan publik, situs web pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses

pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait;

- c. Organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik; dan
- d. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi.

**e. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)**

**Keuangan**

Program aplikasi komputer SIMDA keuangan adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemda dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya

1) Output yang dihasilkan

Output yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan adalah :

1. Penganggaran

- a. Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
- c. Surat Penyediaan Dana (SPD);

2. Penatausahaan

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

- b. Surat Perintah Membayar (SPM);
- c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. Surat Tanda Setoran (STS);
- e. Register; dan
- f. Surat pengendalian lainnya.

### 3. Akuntansi dan Pelaporan

- a. Jurnal;
- b. Buku besar;
- c. Buku pembantu;
- d. Laporan realisasi anggaran;
- e. Laporan arus kas; dan
- f. Neraca.

## 2) Fungsi Program Aplikasi Simda Keuangan

Fungsi utama pengimplementasian SIMDA Keuangan adalah :

1. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban);
2. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat;
3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya;
4. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan; dan

5. Mempermudah proses audit bagi Auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi Electronic Data Processing (EDP)audit.

### 3) Keunggulan dan Manfaat SIMDA Keuangan

Keunggulan atau nilai tambah yang ditawarkan oleh SIMDA Keuangan adalah:

1. Output/Laporan disesuaikan peraturan yang berlaku dan fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan;
2. Berbasis *windows*;
3. Validasi Inputan data lebih terjamin;
4. Terdapat menuotoritas dan unit otoritas;
5. Memfasilitasi setiap fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus melakukan pencatatan akuntansi; dan
6. Memfasilitasi akuntansi pengguna anggaran.

Selain manfaat di bidang pengelolaan keuangan daerah, berikut adalah manfaat lain yang terintegrasi dalam pemanfaatan SIMDA, diantaranya:

#### 1. Sesuai Peraturan

Dengan menerapkan aplikasi SIMDA Keuangan sebagai sebuah sistem informasi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah secara otomatis telah melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan

peraturan pengelolaan keuangan daerah karena aplikasi SIMDA Keuangan dikembangkan atas dasar kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

## 2. Kestinambungan

Dengan lokasi BPKP yang ada di setiap ibukota propinsi, maka pemeliharaan sistem dapat dilakukan secara berkesinambungan dan optimal.

## 3. *Transfer of Knowledge*

Poin yang paling penting dari penerapan sistem ini adalah adanya transfer pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan daerah bagi aparat daerah setempat, tidak hanya masalah operasional sistem saja.

Selain itu, proses asistensi yang dilaksanakan oleh BPKP dalam kaitannya dengan penerapan aplikasi SIMDA di suatu daerah diorientasikan “satu kali untuk selamanya.”

## 4. Terintegrasi

SIMDA merupakan program aplikasi keuangan daerah yang telah mengintegrasikan empat tahapan penyelenggaraan keuangan daerah yaitu, penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. SIMDA juga mengintegrasikan antara proses transaksi keuangan yang terjadi dengan proses penjournalannya secara otomatis. Sehingga, setiap transaksi keuangan

yang terjadi, dapat langsung dilihat jurnal atas transaksi tersebut hingga pelaporannya pada waktu yang bersamaan.

**f. Indikator Implementasi SIMDA**

Merujuk pada penelitian yang dilakukan M. Alfian (2014), Bahri Kamal (2015) dan Ina Rahmi (2016) yang menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. Penerapan yang mudah, artinya implementasi dalam penerapan penggunaan SIMDA pada lembaga atau SKPD dapat dengan mudah diterima penggunaannya.
- b. Kepuasan pemakai artinya apakah dengan di implemtasikannya aplikasi SIMDA ini memberikan kepuasan kepada pengguna (*user*).
- c. Menciptakan efektifitas pekerjaan artinya dengan adanya pengimplementasian SIMDA pada SKPD akan menciptakan afektifitas dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan,
- d. Menciptakan efesiensi pekerjaan maksudnya pengimplementasian SIMDA ini akan membuat suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- e. Informasi mudah didapat artinya dengan penggunaan aplikasi SIMDA ini informasi akan sangat mudah dibagikan oleh setiap bagian/divisi.

### 3. Tingkat Pemahaman Pengguna

#### a. Defenisi Pemahaman

Pamahaman berasal dari kata paham yang artinya (1) pengetahuan yang banyak, (2) pendapat, pikiran, (3) aliran; pandangan, (4) mengerti benar (akan), tahu benar (akan); (5) pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal). Apabila diberi imbuhan me-i menjadi memahami, berarti (1) mengerti benar (akan); mengetahui benar, (2) memaklumi; mengetahui. Sedangkan, jika diberi imbuhan an menjadi pemahaman, berarti proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan (<http://kbbi.web.id/paham>).

Pemahaman menurut sudirman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara memahami (Em Zul, et. al 2008 : 607-608). Sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami. Cara mempelajari baik-baik supaya paham.

#### b. Pengguna

Pengguna atau sering juga disebut dengan *user* yang dimaksud disini adalah sumberdaya manusia (SDM) yang mengoperasikan aplikasi SIMDA pada setiap SKPD. SDM atau *human resources* mengandung dua pengertian. Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha

yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat (Sonny Sumarsono, 2003:4).

Menurut Hariandja (2002:2) Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan disamping faktor yang lain seperti modal. Oleh karena itu SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Dapat dikatakan bahwa pemahaman pengguna dalam Implementasi SIMDA ini merupakan suatu pengetahuan yang banyak dalam melakukan pekerjaan mengoperasikan SIMDA yang tentunya mempunyai nilai ekonomis. Pemahaman pemakai tentang teknologi informasi menentukan keberhasilan suatu sistem informasi. Sebaliknya, ketidaktahuan atau kecemasan pemakai terhadap sistem yang baru dapat menyebabkan kegagalan dalam menggunakan informasi (Mohammad Alfian : 2014).

**c. Indikator Tingkat Pemahaman Pengguna/ User (Sumber Daya Manusia)**

Organisasi yang menyadari pentingnya SDM yang mereka miliki akan melakukan pengelolaan secara efektif, memberikan pembelajaran yang melampaui pekerjaan saat ini dan berupaya untuk fokus pada jangka

panjang. Mondy (2008:210) menjelaskan jantung dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kompetisi SDM dan kinerja organisasi diantaranya:

1. Pelatihan

Pelatihan (*training*) adalah memberikan SDM pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka saat ini, serta mempersiapkan SDM untuk tetap sejalan dengan perubahan dan pertumbuhan organisasi. Pelatihan kerja menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 pasal I ayat 9 adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan.

2. Kualitas pelatihan

Kualitas Pelatihan adalah standar yang harus dipenuhi oleh organisasi atau industri produk dan jasa untuk memenuhi persyaratan sebagai salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja.

3. Masa kerja meningkatkan kualitas

Masa kerja adalah sebagai pengalaman kerja yaitu lamanya seseorang bekerja di suatu instansi atau organisasi yang dihitung sejak pertama kali bekerja, semakin lama bekerja seseorang, tenaga kerja akan semakin dianggap berpengalaman.

Masa kerja adalah jangka waktu orang sudah bekerja pada suatu organisasi, lembaga dan sebagainya. Masa kerja seseorang dalam organisasi perlu diketahui karena dari masa kerja kita dapat melakukan penilaian pada seseorang tentang kecenderungannya dalam melaksanakan aktivitas kerjanya. Contohnya semakin lama seseorang bekerja maka semakin tinggi pula produktivitasnya karena semakin berpengalaman dan mempunyai keterampilan yang baik dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya (Siagian, 1989).

#### **4. Dukungan Manajemen Puncak**

##### **a. Pengertian Dukungan Manajemen Puncak**

Setiap organisasi dalam usaha mencapai tujuan, dan sampai sejauh mana keberhasilan yang dapat dicapai itu memerlukan dukungan manajemen puncak. Dukungan manajemen adalah keterlibatan manajemen dalam mempertahankan perilaku dan pencapaian tujuan organisasi (Cooper, 2006).

Menurut Chen dan Paulraj (2004) mendefinisikan dukungan manajemen puncak sebagai berikut: Berkomitmen pada waktu, biaya, dan sumber daya untuk mendukung supplier agar terjadi kemitraan pada jangka panjang dan perusahaan juga dapat berlangsung berproses secara stabil. Salah satu hal yang penting bagi manajemen puncak dalam menjalankan bisnis adalah harus dapat selalu mengembangkan dan menciptakan satu nilai bagi perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Sedangkan dukungan manajemen puncak menurut Hasmi (2004) adalah sebagai berikut: Pihak yang bertanggungjawab atas penyediaan pedoman umum bagi kegiatan sistem informasi. Tingkat dukungan yang diberikan oleh manajemen puncak bagi sistem informasi organisasi dapat menjadi suatu faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan semua kegiatan yang berkaitan dengan sistem Informasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dukungan manajemen puncak merupakan pihak yang berkomitmen menyediakan pedoman kegiatan sistem, biaya, waktu, dan sumber daya untuk mendukung kegiatan sistem informasi.

**b. Indikator Dukungan Manajemen Puncak (*top management support*)**

Merujuk pada penelitian yang dilakukan M. Alfian (2014), dan Ina Rahmi (2016), dukungan manajemen puncak akan tergambar jelas apabila manajemen puncak tersebut memberikan :

1. Evaluasi

Dalam perusahaan/organisasi, evaluasi dapat diartikan sebagai proses [pengukuran](#) akan eektivitas [strategi](#) yang digunakan dalam upaya mencapai [tujuan](#) perusahaan. [Data](#) yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya.

2. Arahan/perhatian

Tanpa arahan atau perhatian pimpinan, hubungan antara tujuan perseorangan dengan tujuan organisasi mungkin menjadi bias dan kurang tepat sasaran, keadaan ini menimbulkan suatu kondisi dimana karyawan

bekerja dengan kurang efektif dan efisien serta dapat mengganggu keseluruhan kegiatan organisasi dalam pencapaian sasarannya.

### 3. Perkembangan program.

Agar program yang digunakan/akan digunakan berhasil, dibutuhkan dukungan pemimpin dari atas. Keterlibatan mental dan emosi serta fisik dari pimpinan dalam memberikan respon terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan adalah cara yang paling efektif untuk mencapai kesuksesan.

## 5. Kualitas Data

Menurut Mark Mosley (2008) Kualitas data adalah level data yang menyatakan data tersebut akurat, lengkap, *update*, konsisten sesuai dengan semua kebutuhan peraturan bisnis dan relevan. Proses produksi data harus berjalan dengan baik agar mencapai hasil yang berkualitas (Lee dan Kuat dalam Al-Hiyari. et. al., 2013).

Data dapat didefinisikan sebagai kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan, data dapat berupa angka-angka, huruf-huruf atau simbol-simbol khusus atau gabungan darinya (Jogiyanto, Hal: 2). Data tidak dapat bercerita banyak sebelum data tersebut diolah lebih lanjut ke proses *input* dimana tahap ini merupakan proses memasukkan data kedalam komputer lewat alat input (*input device*).

Sebagai deskripsi dari suatu dan kejadian yang kita hadapi data dapat berupa catatan-catatan dalam kertas, buku, atau tersimpan sebagai file dalam database. Data akan menjadi bahan dalam suatu proses

pengolahan data. Oleh karena itu, suatu data belum dapat berbicara banyak sebelum diolah lebih lanjut.

Proses pengolahan data terbagi menjadi tiga tahapan, yang disebut dengan siklus pengolahan data (*Data Processing Cycle*) yaitu :

1. Pada tahapan Input

Yaitu dilakukan proses pemasukan data ke dalam komputer lewat media input (*Input Devices*).

2. Pada tahapan Processing

Yaitu dilakukan proses pengolahan data yang sudah dimasukkan, yang dilakukan oleh alat pemroses (*Process Devices*) yang dapat berupa proses perhitungan, perbandingan, pengendalian, atau pencarian distorage.

3. Pada tahapan Output

Yaitu dilakukan proses menghasilkan *output* dari hasil pengolahan data ke alat output (*Output Devices*) yaitu berupa informasi.

**Indikator kualitas data diantaranya:**

Komponen-komponen kualitas data dalam Rahmi (2016) adalah sebagai berikut:

1. Data yang valid

Data yang valid maksudnya disini adalah data yang sudah diotorisasi secara resmi oleh undang-undang dan memiliki akibat hukum atau kekuatan.

## 2. Data yang legal

Maksudnya disini adalah data yang sah menurut hukum yang berlaku, sudah terjamin, tidak bersengketa.

## 3. Ketersediaan data

Ketersediaan data disini dapat diartikan dengan data yang akan diproses ketahap selanjunya sudah tersedia langsung untuk diproses atau bahkan tidak tersedia.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan implementasi SIMDA, antara lain :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	M. Alfian (2014)	Analisis faktor-faktor yang mendukung implementasi SIMDA dan pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan	1. Tingkat Pemahaman Pengguna 2. Kualitas data input 3. Dukungan manajemen puncak 4. Implementasi simda 5. Kualitas laporan keuangan.	kualitas data input dan Tingkat pemahaman pengguna mempunyai pengaruh yang positif terhadap implentasi SIMDA. Sedangkan dukungan manajemen puncak yang tidak mempunyai pengaruh perhadap implementasi SIMDA dan SIMDA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
2	Al- Hiyari, <i>etal</i> (2013)	Factors that Affect Accounting Information System Implementation and Accounting Information Quality: A Survey in University Utara Malaysia	1. Human Resource 2. Managemen t Commitme nt 3. Accounting Information System 4. Data Quality 5. Accounting Information Quality	Dukungan manajemen puncak dan kualitas data input berpengaruh positif terhadap implementasi SIA, sedangkan sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap implementasi SIA.

				Kemudian penelitian ini juga menemukan adanya hubungan yang signifikan antara sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi terhadap kualitas informasi akuntansi.
3	Bahri Kamal, <i>etal</i> (2015)	Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi simda dan kualitas laporan keuangan pada SKPD di Kota Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Pemahaman Pengguna</li> <li>2. Kualitas Data</li> <li>3. Dukungan Manajemen Puncak</li> <li>4. Kualitas Laporan</li> <li>5. Keuangan</li> </ol>	Dukungan manajemen puncak, kualitas data dan tingkat pemahaman pengguna secara bersama-sama mempengaruhi implementasi SIMDA dan SIMDA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
4	ASHARI (2008)	Factors affecting accounting information Systems success implementation (An Empirical Study on Central Java Small and Medium Company)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna Sistem</li> <li>2. Manajemen Perusahaan</li> <li>3. Dukungan dari Pihak Luar</li> <li>4. Lingkungan Bisnis</li> <li>5. Implementasi SIA</li> </ol>	Manajemen dan dukungan dari pihak luar memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi SIA. Sedangkan faktor pengguna sistem informasi dan lingkungan bisnis tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implentasi SIA
5	M. Ali Murtadho, <i>etal</i> (2016)	Permasalahan imlementasi sistem informasi di perguruan tinggi	-	<p>Permasalahan implementasi sistem informasi dipengaruhi oleh permasalahan yang sifatnya teknis dan non-teknis. Masalah teknisnya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. internet,</li> <li>2. infrastrukturjaringan,</li> <li>3. perangkat komputer dan pendukungnya,</li> <li>4. keamanan sistem,</li> <li>5. integrasi sistem,</li> <li>6. ketersediaan sistem,</li> <li>7. pemeliharaan TI.</li> </ol> <p>Sedangkan masalah non-teknisya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan dan partisipasi,</li> <li>2. Budaya dan perilaku,</li> <li>3. Sumber daya manusia,</li> </ol>

				<p>4. Perencanaan</p> <p>5. Manajemen dan tatakelola TI</p> <p>6. Organisasi</p> <p>7. Konten sistem informasi,</p> <p>8. Anggaran dan biaya,</p> <p>9. Dukungan pimpinan dan karakter kepemimpinan.</p> <p>Jadi dapat diketahui bahwa sumberdaya manusia dan dukungan pemimpin mempengaruhi implementasi sistem informasi.</p>
6	Sang Ayu, et all (2013)	Pengaruh dukungan manajemen puncak, kualitas sistem, kualitas informasi, pengguna aktual dan kepuasan pengguna terhadap implementasi sistem informasi keuangan daerah di Kota Denpasar.	<p>1. Dukungan Manajemen Puncak</p> <p>2. Kualitas Sistem</p> <p>3. Kualitas Informasi</p> <p>4. Pengguna Actual</p> <p>5. Kepuasan Pengguna</p> <p>6. Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah</p>	dukungan manajemen puncak, kualitas informasi dan kepuasan pengguna berpengaruh pada implementasi sistem informasi keuangan daerah. Kualitas sistem dan pengguna aktual secara signifikan tidak berpengaruh pada implementasi sistem informasi keuangan daerah.
7	Dunuk Setiawati (2015)	Analisis Faktor Pendukung Implementasi SIMDA dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta	<p>1. Kualitas Data Input</p> <p>2. Dukungan Manajemen Puncak</p> <p>3. Tingkat Pengetahuan Pengguna</p> <p>4. Implementasi SIMDA</p> <p>5. Kualitas Informasi Akuntansi.</p>	Kualitas data input dan dukungan manajemen puncak berpengaruh positif pada implementasi SIMDA, tetapi tingkat pengetahuan pengguna tentang SIMDA tidak berpengaruh positif terhadap implementasi SIMDA. Kemudian penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi simda berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi.
8.	Ina Rahmi Diy Asya (2016)	Analisis Faktor Pendukung Implementasi SIMDA dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah	<p>1. Kualitas Data Input</p> <p>2. Dukungan Manajemen Puncak</p> <p>3. Kompetensi sumber daya manusia</p> <p>4. Implementasi SIMDA</p> <p>4. Kualitas Informasi</p>	Kompetensi sumber daya manusia dan persepsi keberhasilan sistem berpengaruh positif pada pelaksanaan SIMDA, tetapi kualitas data input dan dukungan

		Kab. Labuhan Batu	Akuntansi.	manajemen puncak tidak berpengaruh positif terhadap implementasi SIMDA. Diketahui juga bahwa implementasi SIMDA berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
--	--	-------------------	------------	---

### C. Hubungan Antar Variabel

Berdasarkan kajian teori dan evaluasi atas penelitian tersebut diatas, maka hubungan variabel dependen dan independen adalah sebagai berikut.

#### 1. Pengaruh tingkat pemahaman pengguna terhadap implementasi SIMDA

Tingkat pemahaman pengguna suatu sistem akan menentukan keberhasilan dari sistem tersebut, sebaliknya ketidakpahaman atau kecemasan pemakai terhadap sistem dapat menyebabkan kegagalan dari sistem tersebut. Teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn (Abdul Wahab, 2014:172) mengatakan dalam mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna (*perfect implemetation*) diperlukan beberapa persyaratan yang salah satunya adanya pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan yang di implementasikan dan kesepakatan yang menyeluruh mengenai tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Penelitian yang dilakukan M. Alfian (2014), Bahri Kamal, et.al. (2015), M. Ali

Murtadho, et.al. (2016) membuktikan bahwa tingkat pemahaman pengguna memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi SIMDA.

Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pemahaman pengguna terhadap suatu sistem akan menentukan keberhasilan implementasi SIMDA tersebut. Maka, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut.

H1 : tingkat pemahaman pengguna berpengaruh secara signifikan positif terhadap implementasi SIMDA.

## **2. Pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap implementasi SIMDA**

Dukungan manajemen puncak adalah keterlibatan manajemen dalam mempertahankan perilaku dan pencapaian tujuan organisasi. Tingkat dukungan yang diberikan oleh manajemen puncak bagi sistem informasi organisasi dapat menjadi suatu faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan semua kegiatan yang berkaitan dengan sistem Informasi. Thong, *et.al.* (1996) menyatakan bahwa jika tingkat dukungan manajemen puncak rendah maka manajemen puncak tidak mungkin terlibat dalam aspek pelaksanaan SIA seperti (tanggapan terhadap rekomendasi konsultan, atau memantau proyek pengembangan SIA tersebut), manajemen puncak meningkatkan efektifitas sistem informasi karena mereka menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek pengembangan SIA. Penelitian yang dilakukan Al- Hiyari, *et.al.*(2013), Bahri Kamal, *et.al.* (2015), Ashari (2008), M. Ali Murtadho, *et.al.* (2016), Sang Ayu, *et.al.* (2013), Dunuk Setiawati (2015), menunjukkan bahwa

dukungan dari manajemen puncak berpengaruh terhadap implementasi suatu sistem.

Organisasi yang memiliki dukungan dari manajemen puncak akan dengan mudah dalam mengimplementasikan suatu sistem. Maka, hipotesis kedua penelitian adalah sebagai berikut.

H2 : dukungan manajemen puncak secara signifikan positif terhadap implementasi SIMDA

### **3. Pengaruh kualitas data terhadap implementasi SIMDA**

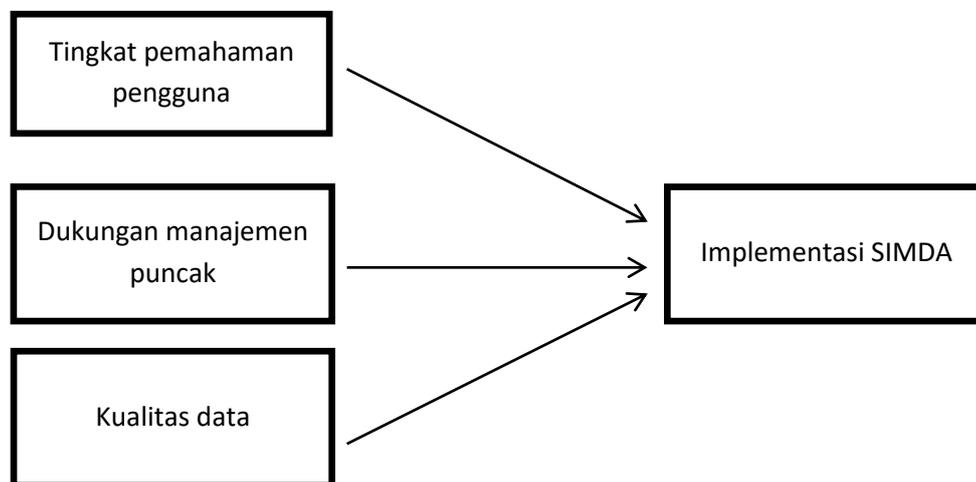
Kualitas data disini mengacu pada bagaimana proses data itu dihasilkan (pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data) harus berjalan dengan baik, agar kualitas data yang digunakan dapat diproses dengan baik. Artinya semakin baik data tersebut diproses akan menghasilkan data yang berkualitas.

Penelitian yang dilakukan M. Alfian (2014), Al- Hiyari, *et.al.*(2013), Bahri Kamal, *et.al.* (2015), Dunuk Setiawati (2015) membuktikan bahwa kualitas data berpengaruh signifikan terhadap implementasi SIMDA. Teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn (Abdul Wahab, 2014:174) juga mengatakan dalam mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna (*perfect implemetation*) juga diperlukan persyaratan dalam melaksanakan tugas-tugas harus terperinci dan ditepatkan dalam urutan yang tepat. Jadi dapat dikatakan dalam menghasilkan data yang berkualitas harus merinci dan menyusun sesuai dengan urutan-urutan yang tepat juga. Berdasarkan

uraian diatas, dapat disimpulkan hipotesis penelitian yang ketiga adalah sebagai berikut

H3 : kualitas data berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi SIMDA.

Berdasarkan latar belakang, kajian teori, dan hubungan antar variabel yang telah dikemukakan diatas, maka secara sederhana kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman pengguna berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi SIMDA.
2. Dukungan manajemen puncak berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi SIMDA.
3. Kualitas data tidak berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi SIMDA.

#### **B. Keterbatasan penelitian**

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Hanya ada tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga belum meneliti semua variabel yang dapat mempengaruhi implementasi SIMDA. Dimana variabel tersebut mempunyai pengaruh sebesar 25,1%, sedangkan 74,9% dipengaruhi oleh variabel lain.
2. Peneliti hanya melakukan penelitian pada Kota Pariaman, sehingga untuk Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang berbeda dapat dimungkinkan terjadinya perbedaan kesimpulan.

### C. Saran

Adapun saran yang mungkin berguna untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya digunakan variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akurasi seperti kualitas laporan keuangan, kualitas sistem, kualitas informasi, kepuasan penggunaan faktor lainnya dalam melakukan penelitian mengenai implementasi SIMDA.
2. Bagi akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah bahan referensi dan menjadi perbandingan bagi penelitian selanjutnya.
3. Dalam penelitian ini masih terdapat kelemahan yaitu ada beberapa responden yang mengisi kuesioner penelitian yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya sehingga data yang diperoleh belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya, maka untuk penelitian selanjutnya sebaiknya selain menggunakan kuesioner dilakukan juga interview/bertanya langsung ke responden secara tegas dan jelas dan sebaiknya daerah penelitian di perluas ke SKPD kota lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bahra bin Ladjamudin, 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Alfian, Mohammad, 2014. *Analisis Faktor Pendukung Implementasi Simda dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD : Penelitian Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo*. (<http://repository.uksw.edu/handle/123456789/5929>). Diakses pada tanggal 26 Maret 2016.
- Al-Hiyari, Ahmad, Al-Mashregy, dan Alekam, J.M. 2013. *Factors that Affect Accounting Information System Implementation and Accounting Information Quality: A Survey in University Utara Malaysia*. American Journal of Economics 2013,3(1): 27-31. (<http://article.sapub.org/10.5923.j.economics.20130301.06.html>). Diakses pada tanggal 26 Maret 2016
- Budiman, Fuad dan Fefri Indra Arza,2013. *Pendekatan Technology Acceptance Model dalam Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi MANAJEMEN daerah*.Jurnal WRA, Vol. 1, No. 1 April 2013, (<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/article/view/2315/1933>). Diakses pada tanggal 27 Maret 2016.
- Chen, Injazz J dan Antony Paulraj.2004.*Towards a theory of supply chain management: the constructs and measurements*.Journal of Operations Management, pp 119-150.

- Cooper, D. 2006. *The Impact of Management's Commitment on Employee Behavior: A Field Study*. American society of safety engineers. ([http://www.behavioral-safety.com/articles/Impact\\_of\\_Management\\_Commitment.pdf](http://www.behavioral-safety.com/articles/Impact_of_Management_Commitment.pdf)). Diakses pada tanggal 26 Maret 2016
- EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, 2008. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Edisi Revisi, Cet. 3, Semarang: Difa Publishers.
- Ghozali, Imam, 2006. *Aplikai Analisis Multivarite dengan SPSS, Cetakan Keempat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiawan, Revan, KamaludindanNasution,2014.*IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) VERSI 2.1 DI BAPPEDA KABUPATEN KEPAHANG (STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF)*. Jurnal Ilmiah Manajemen, 13 (1). pp. 38-50. ISSN 1979-2239, (<http://repository.unib.ac.id/7384/1/vo13no1oktober12b.pdf>). Diakses pada tanggal 4 April 2016.
- Hariandja, Marihot T.E, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo
- Kamal, Bahri dan Asrofi Langgeng Noermansyah, *ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMETASI SIMDA DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA SKD*, (<http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/583>). Diakses pada tanggal 26 Maret 2016.
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang *Sistem Informasi Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Permendagri 13 tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan*.

Satgas Pengembangan SIMDA 2008. *SIMDA dan Penerapannya*. Jakarta: Badan  
Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.  
(<http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Pengenalan-Sistem-Informasi-Manajemen-Daerah-SIMDA-bpkp>). Diakses pada tanggal 1 April 2016.

Satgas Pengembangan SIMDA 2008. *SIMDA dan Penerapannya*. Jakarta: Badan  
Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.  
(<http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/334/serah-SIMDA-bpkp>). Diakses  
pada tanggal 1 April 2016.

Seddon, Peter B. 1997. A Respecification and Extension of the DeLone and  
McLean Model of IS Issues. *Information System Research* Vol. 8 No. 3.

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung:  
Alfabeta

Sumarsono, Sonny, 2003. *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Thong, James Y.L. 2001. Resource Constraints and Information Systems  
Implementasion in Singapore Small Business. *The International Journal of  
Management Science* hal. 143-156.

Wahab, Solichin Abdul, 2014. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan  
Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Xu, Hongjiang. 2003. Critical Success Factor for Accounting Information System  
data Quality. *Tesis*. Universita od Southern Queensland.